

MORAL ISLAM DALAM MEMBANGKITKAN ETOS EKONOMI UMMAT

M. Rahmat Effendi*

Abstrak

Di bidang ekonomi, Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan pengembangannya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Islam tidak merelakan tenaga manusia atau komoditi terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat “itqan” (ketekunan) yang diridhai oleh Allah atau “ihsan” yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.

Al-Qur’an menganjurkan kita untuk menggunakan sumber kekayaan alam. Al-Qur’an merangsang akal kita, mengarahkannya kepada pandangan dunia yang dikelilingi oleh alam yang diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa memanfaatkan semua itu terfokus dalam dua hal:

***Pertama**, ilmu atau sains yang berdiri di atas fondasi rasio dan akal budi. Melalui akal budi ini, Allah membedakan manusia dari hewan. **Kedua**, bekerja; Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktekkan dengan bekerja. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tetapi terus menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah.*

Bekerja di dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia memiliki kemampuan.

Kata Kunci :Moral, Ethos, dan Ekonomi

* H.M. Rahmat Effendi, Drs., M.PdI, adalah dosen Tetap Fakultas Dakwah Unisba

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi bergulir tahun 1998, kondisi perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar didunia yang dulu dipuji-puji sebagai negeri ajaib dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki masa depan yang cerah, tiba-tiba terjebak dalam krisis ekonomi dan moneter (krismon) berkepanjangan.

Hutan nyaris habis, bencana alam meruyak di mana-mana, perindustrian bertumbuhan, berakibat PHK semakin menjadi-jadi, angka pengangguran pun membengkak. Data BPS Maret 2006 tercatat 39,75 %. Naik 17,75% dari total penduduk 222 juta jiwa (data TIB Tim Indonesia Bangkit 22%). Angka kemiskinan terus merayap, harga-harga semakin membumbung tinggi sementara daya beli semakin merosot.

Upaya mendapatkan bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia yang mensyaratkan pencabutan subsidi BBM, malah membawa bangsa ini semakin terpuruk. Melimpahnya dana dari luar sebagai dana pinjaman malah menjadi peluang bagi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi. Sementara penyelesaian tindak pidana korupsi masih terkesan tebang pilih.

Penyelundupan meruyak menyebabkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar. *Illegal logging* maupun eksploitasi hutan resmi oleh pemegang HPH lalu hasilnya diselundupkan ke luar negeri menyebabkan semakin parahnya lingkungan dan pada gilirannya menimbulkan bencana alam yang menengsarakan terutama bagi rakyat kecil. Dari luar penyelundupan masih marak. Bukan saja produk tekstil dan elektronik, bahkan penyelundupan shabu-shabu dalam jumlah besar pun terjadi. (Baru-baru ini terbongkar shabu-shabu selundupan sebanyak hampir satu ton di pantai Tanggerang, Banten).

Dalam pada itu, besarnya beban utang menyebabkan kita terjebak dalam jeratan hutang yang dijadikan alat untuk menekan Indonesia baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

Persoalannya adalah : “Mengapa bencana ini menimpa Indonesia, negeri subur makmur yang dikenal dengan julukan “Jamrud Khatulistiwa” harus mengalami keterpurukan?” Persoalan ini mendorong bangsa

Indonesia, khususnya umat Islam, agar membedah kondisi keterpurukan ini.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi sumber permasalahan yang menyebabkan perekonomian Indonesia harus mengalami keterpurukan yang sangat parah?
2. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan perekonomian bangsa Indonesia khususnya umat Islam kepada keadaan normal atau merubah bencana menjadi rahmat?
3. Masihkah kita memiliki potensi untuk bangkit kembali?

2. Pembahasan

2.1 Kapitalisme Global

Penulis berasumsi bahwa sumber utama yang membawa keterpurukan perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi yang kapitalistis dan salah urus. Sistem kapitalis adalah sebuah sistem yang mengabaikan norma-norma moral, kebersamaan dan lebih berpihak kepada pemilik modal. Sebuah sistem yang bertolak belakang dengan semangat (etos) Islam.

Kapitalisme berawal dari revolusi industri di Eropa pada penghujung abad ke 18, pasca tumbangannya kekuasaan Islam di Spanyol oleh kaum Nasrani setelah umat Islam berkuasa di sana selama enam abad. Tumbangannya kekuasaan Islam di sana bukan saja merupakan tragedi yang sangat mengenaskan dan di luar kemanusiaan, karena penguasa Nasrani yang menaklukkan kekuasaan Islam di sana hanya memberi alternatif: *“beralih agama dari Islam ke Nasrani atau dibunuh, tapi juga tragedy intelektual”*. Buku-buku warisan intelektual muslim seperti sains dan teknologi serta ilmu-ilmu eksakta (fisika, kimia, astronomi dan lain-lain) jatuh ke tangan mereka lalu di terjemahkan untuk dipelajari dan kemudian buku-buku aslinya dibakar habis.

- Revolusi Industri

Ali Syariati (*Civilization and Modernization* – terjemahan, 1980) menggambarkan dengan rinci lahirnya paham kapitalisme. Berawal dengan terusnya Islam dari bumi Spanyol, Eropa mengalami abad pencerahan (*aufklarung* atau *renaissance*). Buahnya diciptakan berbagai peralatan produksi seperti mesin-mesin industri. Eropa kemudian masuk ke revolusi industri.

Berkat mesin-mesin yang baru ditemukan, barang-barang kebutuhan hidup diproduksi secara cepat dan massal. Terjadilah fenomena, barang berlimpah pembeli sedikit, maka harganya pun menjadi jatuh. Pada saat itu terjadilah *malise*, barang melimpah tidak seimbang dengan potensi pasar atau terjadi surplus produksi. Maka pada era inilah lahir sistem kapitalisme.

Dengan terjadinya surplus produksi, mereka harus menyediakan lapangan baru untuk konsumsi. Tingkat produksi naik secara konstan melebihi kebutuhan bangsa Barat. Oleh karena itu, terjadilah kejenuhan pasar. Solusinya barang produksi itu harus dijual ke luar batas wilayahnya. Surplus barang-barang harus dibawa ke Asia dan Afrika. Jadi orang Asia dan Afrika harus mengkonsumsi surplus produk Eropa.

Masalahnya, dapatkah mereka membawa barang-barang itu kepada bangsa-bangsa yang pola hidupnya tidak memerlukan semua itu dan memaksa mereka untuk mengkonsumsinya? Jelas tidak mungkin. Di kawasan negeri-negeri ini pakaian orang Asia dibuat oleh isterinya atau industri tradisionalnya. Mereka mengenakan pakaian tradisional. Dinegeri ini tidak memerlukan produk buatan mesin dari pihak pabrik atau pakaian "bermode tinggi" atau bahan modern dari Eropa. Mustahil untuk mengharap pria dan wanita Asia dan Afrika untuk menggunakan produk-produk ini pada abad 18 dan 19, sekalipun produk tersebut disediakan gratis. Mereka memiliki kenikmatan lain. Mereka memiliki hiasan-hiasan asli yang khas sendiri.

Sebagai akibat logis dari sikap tersebut, barang-barang dagangan kaum kapitalis tetap tak terjual. Orang-orang dengan cara berpikir semacam ini, dengan kebutuhan dan selera yang unik, yang memiliki gaya hidup mereka sendiri, memproduksi kebutuhan mereka sendiri, bukanlah merupakan jenis orang yang akan mengkonsumsi produk dari kaum kapitalis Eropa abad ke 18.

- Menciptakan Pasar

Bagaimana menjadikan orang-orang di Asia dan Afrika sebagai konsumen produk Eropa. Hal ini mengubah suatu bangsa. Mereka harus mengubah suatu bentuk seorang manusia dengan maksud mengubah pakaiannya, pola konsumsinya, hiasannya, tempat kediamannya dan kotanya.

Pertama-tama mereka merubah moralnya dan pikirannya: Semua orang di dunia harus seragam. Mereka harus hidup serupa. Mereka harus berpikir serupa.

Secara praktis, mustahil semua bangsa berpikir dalam cara yang sama. Karena kepribadian dan jiwa seseorang manusia dan bangsa memiliki unsur-unsur: Agama, sejarah, kebudayaan, peradaban, pendidikan dan tradisi. Semua itu adalah unsur-unsur struktural dari kepribadian dan jiwa seseorang dan secara umum elemen-elemen suatu bangsa.

Unsur-unsur tersebut berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, termasuk bangsa Asia dan Afrika dengan bangsa di Eropa. Kaum kapitalis berupaya merubahnya sehingga semuanya harus menjadi sama. Perbedaan-perbedaan dalam pikiran dan jiwa bangsa di dunia harus dihancurkan supaya manusia menjadi seragam. Mereka harus sesuai dimana pun mereka berada dengan suatu pola tunggal.

Pola dimaksud adalah pola yang ditetapkan oleh Eropa. Ia menunjukkan kepada semua orang timur (orang Asia dan Afrika), bagaimana mereka harus berpakaian, bagaimana mereka harus bersedih, bagaimana mereka harus membangun rumah, bagaimana mereka harus membina hubungan sosial mereka, bagaimana mereka harus mengkonsumsi dan sebagainya. Segera disadari bahwa suatu kebudayaan baru yang disebut "modern" telah disajikan keseluruh dunia.

- Atas Nama Modernisasi

Menurut Syariati, Modernisasi adalah metode paling baik untuk menyesatkan dunia non Eropa dari segala susunan dan bentuk pemikiran serta kepribadian mereka sendiri. Satu-satunya tugas orang Eropa adalah mengiming-imingi "modernisasi" di hadapan setiap corak non Eropa.

Untuk membuat semua orang non Eropa termodernkan, pertama sekali mereka harus mengatasi pengaruh agama, karena agama menyebabkan setiap

masyarakat merasakan sesuatu individualitas yang khas. Agama mendalilkan suatu intelektualitas yang Maha Luhur.

Jika intelek ini dihancurkan dan dihinakan, seseorang yang mengidentifikasi diri dengannya juga merasa dihancurkan dan terhina. Jadi kaum intelektual pribumi memulai suatu gerakan menghancurkan "fanatisme". Karena agama, sejarah kebudayaan sebagai keseluruhan intelektual pemikiran, kekayaan seni dan kesusasteraan memberikan kepribadian kepada masyarakat, mereka harus dihancurkan.

- Penjajahan Ekonomi

Pola ini tetap dipertahankan sampai saat ini. Jadi mustahil negara-negara industri maju membiarkan negara-negara konsumen mengubah diri menjadi negara-negara produsen, sebab dengan demikian bertentangan dengan khittah mereka yang berarti mereka akan kembali seperti yang dialami pada abad ke 18.

Perbedaannya dengan masa sekarang hanya terletak pada metode. Kalau pada abad ke 18 disertai dengan penjajahan secara fisik untuk mencari bahan mentah dan energi bagi industri mereka, sehingga penjajahan kuno mereka tinggalkan. Biarkan mereka merdeka tapi tetap harus tergantung kepada bangsa yang pernah menjajahnya. Sekarang penjajahan dilakukan dengan cara "memberi" bantuan berupa hutang. Missinya agar negara-negara berhutang itu: *pertama* memiliki ketergantungan kepada mereka yang memberi hutang. *Kedua*, agar negara-negara penghutang itu bisa memiliki daya beli produk negara-negara industri. Itu sebabnya gaya penjajahan sekarang disebut "*neo kolonialisme dan neo kapitalis*".

2.2 Relevansinya dengan Indonesia

Bagaimana relevansinya dengan Indonesia?

Awal bencana, ketika mulai membangun dengan utang. Dan itu dilakukan sejak awal Orde Baru (orba). Sepintas, membangun dengan hutang itu berhasil. Tapi keberhasilan itu semu. Hasilnya dinikmati sekelompok pengusaha kaya umumnya nonpri dan birokrat yang melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotis (KKN); pengusaha asing yang mendapat konsesi dan para konglomerat. Negara kita ibarat hidup tergantung belas kasihan rentenir bernama IMF dan Bank Dunia.

- Jebakan Hutang

Cheryl Payer, pengamat ekonomi Amerika Serikat menulis dalam *"The Debt Trap Monthly Review Press"*, 1974, bahwa IMF dan Bank Dunia adalah "lintah darat" yang bisa mencekik negara miskin. Dalam menjalankan praktek rentenirnya, IMF menggunakan cara yang canggih. Kalau menagih, senantiasa menawari "bantuan" baru agar pengutang bisa mencicil utangnya. Ini sekaligus investasi jangka panjang, karena pada gilirannya, pinjaman baru harus dibayar lagi kelak (Jawa Pos 11/3/1998).

Pendapat Payer itu relevan dengan nasib bangsa Indonesia saat ini yang tengah terjerat hutang. Dan karena hutang itu dalam mata uang asing, maka untuk membayarnya diambil dari devisa. Devisa ini diambil dari surplus perdagangan (ekspor dikurangi impor) plus pinjaman baru. Fatalnya komponen pinjaman luar negeri ini jauh lebih besar dari pada surplus perdagangan.

- Bunga Hutang

Pada tahun 1993, ekspor Indonesia US\$ 29 miliar, sedangkan impornya US\$ 26 miliar, atau surplus sekitar US\$ 3 miliar. Saat itu hutang-hutang Indonesia US\$ 73 miliar. Andaikata bunga hutang itu 5 % (serendah bunga deposito dalam dolar), maka itu sudah US\$ 3.65 miliar. Maka setiap tahun, tanpa hutang baru pun negeri ini semakin defisit. Oleh karena itu, Dorojatun Kuncorojakti (Menteri Perekonomian di era Kabinet Presiden Megawati), dalam seminar bertajuk: "Peran Penanaman Modal Dalam negeri dan Asing dalam Tatanan Perekonomian Kerakyatan", di Jakarta, mengeluhkan: "Kita sudah capek-capek bekerja keras hasilnya cuma untuk bayar bunga utang yang 60 triliun".

- Pembangunan Salah Urus

Sejak semula bangsa Indonesia bertekad untuk bangkit dengan pembangunan. Namun tampaknya sudah salah arah. Membangun yang serba besar dengan modal besar pula. Ini bertentangan dengan semangat AMPERA (amanat penderitaan rakyat) yang sering didengarkan di jaman Orde Baru. Semangat Ampera ini berarti keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan peran UKM (Usaha Kecil Menengah) yang jumlahnya dominan di republik ini.

Arah pembangunan ini tampaknya belum berhasil dikoreksi sampai saat ini. Bahkan sekarang bukan saja mengutang, tapi atas nama ekonomi

global, asset-asset negara BUMN banyak sudah dijual ke tangan Asing. Akibatnya kita hanya menjadi bangsa kuli di negeri sendiri. Di sisi lain, tumbuhnya etos ekonomi Islam dan bentuk pola Syari'ah, upaya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, semangat berzakat, berinfaq dan bersodaqoh serta upaya untuk memberdayakan KUKM, membersihkan harapan baru bagi negeri ini untuk segera terlepas dari cengkraman kapitalis global.

2.3 Moral Islam dalam Membangkitkan Perekonomian Ummat

2.3.1. Prinsip-Prinsip Moral Islam dalam Perekonomian

Sekurang-kurangnya ada empat prinsip (sendi utama) moral Islam dalam perekonomian, yaitu: (1) *Ketuhanan (Tauhid)*, (2) *Etika*, (3) *Kemanusiaan*, dan (4) *Sikap pertengahan (Tawazun)*. Keempat sendi utama ini merupakan ciri khas perekonomian Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama ummat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, maupun ekspor impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini. Kalau tidak maka dapat dipastikan bahwa Islam hanya sekadar simbol atau slogan dan pengakuan belaka. (Yusuf Qardawi: 1997)

- Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan **Ketuhanan (Tauhid)**. Bertitik tolak dari Allah, berjalan dengan menggunakan sarana di atas syari'at Allah, dan bertujuan akhir kepada Allah. Aktivitas seperti – *produksi, distribusi, konsumsi, impor-ekspor*– tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk mencari ridla Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka pekerjaannya itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. (QS. Al-Mulk: 15)

Oleh karena itu, *prinsip Ketuhanan (Tauhid)* yang direfleksikan dalam kejujuran, ketelitian, dan *wara'* (asketik) menjadi kunci utama dalam perekonomian Islam. Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman tangannya adalah milik Allah, yang antara lain dipertahankan oleh pemilikannya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkannya. (QS.An-Nur (24): 33)

Prinsip Tauhid yang menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi yang lebih penting adalah keuntungan yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT.

Prinsip Tauhid mengantarkan seorang pengusaha Muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam bukan saja melarang *praktik riba* dan pencurian, tetapi juga penipuan terselubung, bahkan sampai kepada larangan menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

- Prinsip Etika

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan nilai, politik dengan etika, perang dengan etika dan seterusnya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia khususnya dalam perekonomian. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Kebebasan dalam berekonomi yang mengantarkan manusia untuk mencari keuntungan, bukanlah kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Kebebasan bagi muslim harus mengantarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapannya (baik dan buruk). Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan *buhul akidah* dan *etika mulia*, disamping dengan hukum-hukum Allah. Prinsip ini kemudian melahirkan prinsip *tanggung jawab*.

Tanggung jawab baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, Islam memperkenalkan konsep "*fardlu 'ain*" dan "*fardlu kifayah*". Yang pertama adalah kewajiban individual yang tidak dapat diberikan kepada orang lain; sedang yang kedua adalah kewajiban yang bila dikerjakan oleh orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan yang dituntut, maka terbebaskanlah semua anggota masyarakat dari pertanggungjawaban (dosa). Tetapi bila tidak seorangpun yang mengerjakannya atau dikerjakan

oleh sebagian namun belum memenuhi apa yang seharusnya, maka berdosalah setiap anggota masyarakat.

Atas prinsip ini, para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam (Syari'at). Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya.

J. Perth (dalam Quraish Shihab: 1996) mengatakan, bahwa kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru di dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan rohani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum Protestan dengan renaisansnya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah Islam. Sebab, keuniversalan syari'at Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika.

- Prinsip Kemanusiaan

Selain bercirikan Ketuhanan (*Tauhid*) dan Etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.

Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam *nash* itu. Manusialah yang memahami *nash*, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikan dalam praktek ekonomi. Dalam ekonomi, manusia adalah **tujuan** dan **pelaku**. Manusia diwajibkan menunaikan tugas terhadap Tuhannya, dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits serta tertulis di dalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.

Islam juga menganjurkan kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak yatim, miskin papa, dan yang terputus dalam perjalanan.

Islam mengajarkan sikap bertenggang rasa kepada para janda, tua renta, dan orang yang tidak sanggup bekerja. Buah yang dipetik dari etika ini ialah diakuinya oleh Islam milik individu, dengan syarat barang itu diperoleh dengan jalan halal. Islam juga menjaga milik individu dengan segala undang-undang dan etika. Adalah hak manusia untuk menjaga dan memanfaatkan hak milik dan hartanya secara proporsional dan profesional (adil)

- Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula Al-Qur'an menolak tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu saja. (QS.Al-Hasyr (59): 7)

Dalam prinsip ini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini tercermin pada ayat 34 surat at-Taubah, yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun.

Berkaitan dengan ini Rasul saw. bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, dengan tujuan menaikkan harganya, maka ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga berlepas diri darinya”. (HR. Abu Dawud)

Ayat dan hadits di atas, oleh sebagian pakar dijadikan dasar pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan, dan yang mengambil keuntungan secara berlebihan, karena mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya. Di samping itu, pemborosan dan sikap konsumtif pun dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan akibat kenaikan harga.

Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam menugaskan pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar paling tidak bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh seluruh anggota masyarakat.

Dalam kaitan ini Rasulullah saw., bersabda yang artinya:

“Masyarakat berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api”. (HR. Abu Dawud)

Tiga komoditi ini merupakan kebutuhan masyarakat, dan tentunya setiap masyarakat dapat memiliki kebutuhan-kebutuhan lain, yang dengan demikian masing-masing dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhannya.

Karenanya seorang (pedagang) muslim dilarang untuk: **Menimbun barang** untuk dijual pada saat harganya sudah tinggi. Perbuatan ini merupakan penganiayaan yang buruk yang bahayanya akan menimpa kepada masyarakat. Perbuatan semacam ini menurut ajaran Islam sangat tercela dan terkutuk; **Mengedarkan uang palsu** (penggandaan); **Memuja barang** dengan sangat berlebihan agar barang dagangan cepat laku; **Menyembunyikan kecacatan barang**; **Curang dalam takaran dan timbangan**; **Menjelaskan harga pasar dengan tidak jujur**.

2.3.2 Moral Islam Dalam Bidang Produksi

Produksi dalam arti *“menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia”*.

Sumber alam adalah *kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk manusia dengan bermacam-macam jenis*, yang meliputi antara lain: (1) lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda; (2) lapisan kering, yang terdiri dari: debu, bebatuan, dan barang tambang. (3) lapisan air. (4) lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, termasuk kekayaan laut. Kekayaan dari gaya grafitasi bumi dan sinar matahari.

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan pengembangannya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau komoditi terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *“itqan”* (ketekunan) yang diridlai oleh Allah atau *“ihسان”* yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.

Produksi mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (a) Swasembada individu; dan (b) Swasembada masyarakat dan ummat.

Al-Qur'an menganjurkan kita untuk menggunakan sumber kekayaan alam. Al-Qur'an merangsang akal kita, mengarahkannya kepada pandangan dunia yang dikelilingi oleh air, udara, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda mati; matahari dan bulannya, malam dan siangnya. Semua itu

diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. (renungkan firman Allah surat Ibrahim, ayat: 32-34)

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa memanfaatkan semua itu terfokus dalam dua hal:

Pertama, ilmu atau sains yang berdiri di atas fondasi rasio dan akal budi. Melalui akal budi ini, Allah membedakan manusia dari hewan. (Periksa QS. Al-Kahfi:96-97; surat Ibrahim 33; surat an-Nahl: 12; surat Faathir: 27-28). *Kedua*, bekerja; Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktekkan dengan bekerja. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tetapi terus menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah.

Bekerja di dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan "*mengkhususkan waktu untuk beribadah*" atau bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi seseorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia memiliki kemampuan.

Produktivitas timbul dari gabungan kerja antara manusia dan kekayaan bumi. Bumi tempat membanting tulang, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya. Disiplin merupakan strategi dan pengawasan, sementara modal adalah aset, baik yang berbentuk alat atau bangunan dan lain sebagainya. Disini terlihat bahwa unsur terpenting dalam produksi adalah bekerja. Bekerja mengolah bumi hingga menghasilkan harta dan apa-apa yang baik.

Dalam pandangan Islam uang atau modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Sebagai modal, uang atau harta harus berkembang dan berputar untuk memenuhi hajat manusia. Cara-cara untuk mengembangkannya para Ulama melahirkan istilah-istilah: **Murabahah** yaitu *pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh pengutang dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang disepakati*. **Mudharabah** (periksa HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah), yaitu *bergabungnya tenaga kerja dengan pemilik modal, sebagai mitra usaha dan keuntungan yang dibagi sesuai rasio yang disepakati*. **Musyarokah** (periksa H.R. AbuDawud no.2936, Kitab al-Buyu'), yaitu *memadukan modal untuk bersama-sama memutarkannya, dengan kesepakatan tentang rasio yang akan diterima*.

Karena harta benda berfungsi sosial, maka harta tersebut tidak dibenarkan untuk dimiliki orang-orang yang menyia-nyiakannya. Dari sini dapat diketahui bahwa walaupun masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita mempunyai hak terhadap hasil usahanya, namun hal tersebut tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.

2.3.3 Tidak Monopoli dan Tidak Riba

Prinsip moral dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim (baik individu maupun kelompok) adalah berpegang pada semua yang **dihalalkan** Allah dan **tidak melewati batas**. Karenanya tidak ada monopoli dan tidak ada riba di dalam ekonomi Islam.

Di dalam al-Qur'an ditemukan kata **Riba** sebanyak 8 kali, tiga di antaranya turun setelah Nabi Hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah. **Riba** dari segi bahasa berarti "*kelebihan*". Di dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, dijelaskan yang artinya, bahwa "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan atau hikmah sehingga "*riba*" diharamkan dan "jual beli" dihalalkan.

Kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tentang "**riba**" terutama yang turun di Madinah adalah "*Adh'afan mudhaafatan*" (=berlipat ganda), *ma baqiya minarriba* (=apa yang tersisa dari riba) dan *falakum ru'uusu amwalikum, la tadhlimun wa la tudhlamun*.

Quraish Shihab (1996:414) mengambil kesimpulan bahwa: "*riba yang dipraktekkan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.*" Hal ini diperkuat oleh praktek Rasulullah saw, yang membayar hutangnya dengan berlebihan. Dalam konteks pembayaran berlebihan ini Nabi saw, bersabda: "*Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar hutang*". (HR. Muslim)

2.3.4 Etos Ekonomi Ummat Islam

Di Indonesia, tanda-tanda kebangkitan etos ekonomi Islam sebenarnya tidak pernah padam. Sejak jaman kolonial, semangat berniaga sudah tumbuh. Kebangkitan pertama, ketika berdirinya organisasi Syarikat Dagang

Islam (SDI) yang didirikan oleh Kiai Samanhudi di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan memberdayakan penduduk pribumi dalam bidang perdagangan.

Semula organisasi ini bertujuan membendung arus perdagangan warga Tionghoa yang waktu itu sudah mulai pesat. Organisasi yang semula didirikan oleh para pedagang batik ini dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Akan tetapi karena tekanan politik dari pemerintah kolonial, menyebabkan SDI berubah menjadi Syarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto.

Perjalanan selanjutnya, kebijakan pemerintah terutama pada era Orde Baru lebih mengarah kepada kebijakan kapitalistik. Politik pintu terbuka dalam arti membuka selebar-lebarnya terhadap bantuan dana dari negara-negara kaya bergulir sejak awal-awal pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ini ternyata menjadi ladang subur untuk ditanami KKN. Sementara kebijakan ekonomi melalui deregulasi-deregulasi menyebabkan lahirnya konglomerat-konglomerat non pri dan kerabat serta kroni Soeharto.

Soeharto beralasan membiarkannya tumbuh perusahaan-perusahaan konglomerat dengan dalih untuk pemerataan. Caranya dengan memangkas modal konglomerat itu untuk kemudian dialirkan kepada kelompok koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah. Akan tetapi upaya ini gagal. Para konglomerat itu ternyata mengalirkan modalnya ke luar negeri (*capital flight*), sementara pengusaha ekonomi lemah semakin terpuruk.

Kebangkitan ekonomi Islam ini mulai timbul lagi tatkala munculnya UU No. 10 Tahun 1998 revisi dari Amandemen UU No.7 Tahun 1992. Kemudian digulirkannya Bank Syari'ah melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak itu Bank ini semakin populer dan Bank-Bank konvensional terpaksa mengadopsinya karena khawatir kehilangan nasabah ummat yang mulai mengalir ke BMI yang tanpa bunga riba. Keadaan semakin kondusif setelah lahirnya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan disusul oleh Muhammadiyah: Tentang haramnya berbagai bunga (bunga Bank, asuransi, pegadaian, dll) (16/12/2003). Disusul dengan keluarnya beberapa fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi Syari'ah (Januari 2004). Sehingga pada bulan Agustus 2006, tercatat: 3 Bank Umum Syari'ah, 17 Unit Usaha Syari'ah (UUS), dengan jumlah kantor sebanyak 163 dan kantor kas 136, serta BPR Syari'ah mencapai 90.

Dalam data statistik perbankan syari'ah Bank Indonesia Oktober 2006 mengenai jaringan kantor perbankan syari'ah, perkembangan aset perbankan

syari'ah, dan pangsa pasar perbankan syari'ah terhadap total bank antar bank syari'ah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

2.3.5 Prospek Ekonomi Kerakyatan

Pengalaman membuktikan, tatkala Indonesia dilanda krismon (krisis moneter) banyak perusahaan-perusahaan bermodal besar bertumbangan. Ternyata sektor informal yakni pedagang-pedagang kecil dan menengah (UKM) masih tetap berdiri tegak.

Di kalangan ummat sendiri saat ini mulai tampak semangat kebangkitan ekonomi Islam bercirikan semaraknya kesadaran berzakat, berinfaq, dan *bersodaqoh*. Selain Dompot Du'afa yang telah menyelenggarakan rumah sakit bersalin gratis, sekolah gratis, bea siswa, dan bus kota gratis bagi pelajar keluarga kurang mampu, pengumpul zakat juga dilakukan oleh beberapa lembaga seperti: Rumah Zakat Ummul Qura, Lazis DDII, PZU (Pusat Zakat Ummat) oleh Persis dan Baznas.

Di Jawa Barat, sejak tahun 1998 periode Gubernur R. Nuriana dibentuk forum silaturahmi ormas Islam. Ormas Islam yang tergabung didalamnya adalah NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan Matla'ul Anwar. Isu utama Forum ini adalah membangun kebersamaan dalam meningkatkan ekonomi ummat Islam khususnya yang berada di Jawa Barat. Maka dibentuklah suatu badan yang disingkat BPEM (Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Jawa barat.

Mengawali kegiatannya, kerjasama antara dinas KUKM Provinsi Jawa Barat dengan Forum Silaturahmi Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Matla'ul Anwar) Jawa Barat melakukan Diklat Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan di bidang Manajemen Perkoperasian bagi para Pengelola KUKM di Lingkungan Ormas Islam Jawa Barat. (Bandung, September 2006). Sebelumnya, sejak April hingga Juni 2007, dilakukan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah dan Pola Pembiayaan Syari'ah bagi 5 (lima) Ormas di 25 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Kegiatan tersebut, secara bertahap akan terus dilakukan hingga 2008.

Fenomena bangkitnya etos ini, kedepan tampaknya akan mewarnai sistem perekonomian Indonesia. Skenarionya, Zakat, Infaq, *Shadaqah* merupakan tahap pertama untuk memberdayakan kaum du'afa mendapatkan modal usaha.

Modal utama adalah kejujuran. Oleh karena itu para pengelola ZIS harus senantiasa dibimbing dan dikembangkan bukan saja dalam bidang manajemen usaha tapi dari akhlak dan tanggung jawabnya. Mereka harus memahami dan menyadari bahwa hal itu merupakan usaha perdagangan dengan Allah SWT. Pada tahap ini diharapkan tumbuh pengusaha-pengusaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang siap memperbaiki keterpurukan ekonomi Indonesia.

4 Kesimpulan

Uraian di atas menggambarkan bahwa:

1. Keterpurukan ekonomi Indonesia disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis, yakni sebuah sistem yang mengabaikan norma-norma moral, kebersamaan, dan lebih berpihak kepada pemilik modal. Oleh karena itu, sistem kapitalis sangat bertolak belakang dengan semangat (etos) Islam. Kemudian salah urus, bantuan dana dari negara-negara kaya bergulir menjadi ladang yang subur bagi kelompok tertentu untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Sistem ekonomi syari'ah harus dibangkitkan, karena sistem ekonomi syari'ah didasari oleh empat prinsip (sendi utama): (1) *Ketuhanan (Tauhid)*, (2) *Etika*, (3) *Kemanusiaan*, dan (4) *Sikap pertengahan (Tawazun)*. Keempat sendi utama ini merupakan ciri khas perekonomian Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama ummat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Sehingga pada gilirannya etos ekonomi bangsa akan bangkit kembali yang selama ini telah padam.
3. Bangsa Indonesia khususnya ummat Islam masih memiliki kekuatan untuk bangkit dengan cara mengembangkan ekonomi kerakyatan. Karena sektor informal yakni para pedagang kecil dan menengah (UKM) tetap berdiri tegak walaupun badai krismon melanda bangsa Indonesia yang mengakibatkan bertumbuhannya perusahaan-perusahaan besar. Ummat Islam masih memiliki modal untuk maju kedepan, yaitu dengan mendayagunakan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Menurut Ketua BAZNAS, zakat saja belum sampai 10 % dari yang wajib zakat untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Ali, Fachry. 1984. *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*. Bandung : Mizan.

Alisyahbana, St. Takdir. 1988. *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*. Jakarta : PT Dian Rakyat.

Badan Penelitian Koperasi Depkop. 1984. *Memperkokoh Pilar-Pilar Kemandirian Koperasi*. Ontologi Esei.

Korver, A.P.E.. 1985. *Syarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta : PT Grafitipers.

Natsir, M.. 1988. *Kebudayaan Islam dalam Prospek Sejarah*. Jakarta : PT Girimukti Pusaka.

Rais, M. Amien. 1987. *Cakrawala Islam*. Bandung : Mizan.

Syariati, Ali. 1983. *Kritik Islam atas marxisme dan Sesat Pikir Barat Lainnya*. Bandung : Mizan.

----- . 1984. *Ideologi Kaum Intelek*. Bandung : Mizan.

Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir : Dar al-Qolam.

Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung : Mizan.